

Laporan Kinerja
KPKNL Samarinda

2024





KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis, dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda Tahun 2024 dengan sistematika yang ditentukan.



Pada Tahun 2024, KPKNL Samarinda mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar 114,85%. Nilai tersebut merupakan hasil dari capaian kinerja dari masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* 110,60%, *Customer Perspective* 110,45%, *Internal Process Perspective* 119,73% dan *Learning and Growth Perspective* 118,61%. Kami harapkan LAKIN ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja KPKNL Samarinda selama Tahun 2024.

Apresiasi tertinggi kami berikan kepada seluruh pegawai KPKNL Samarinda yang telah berkinerja dengan baik dan selalu memegang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan tugas sehingga bisa menjaga akuntabilitas kinerja KPKNL Samarinda. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Samarinda, 23 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Samarinda

Ditandatangani secara elektronik
Bagus Kurniawan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	1
C. PERAN STRATEGIS INSTANSI.....	4
D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI.....	8
E. SISTEMATIKA LAPORAN.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS.....	10
B. PERJANJIAN KINERJA.....	14
C. PENGUKURAN KINERJA.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	24
1. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023.....	24
2. Kinerja KPKNL Samarinda Tahun 2019-2023.....	28
3. Upaya dalam Rangka Pencapaian Kinerja.....	30
4. Evaluasi dan Analisis Keberhasilan Kinerja.....	33
5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	36
5. Program/Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja.....	36
7. Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko.....	38
8. Rencana Aksi.....	39
B. REALISASI ANGGARAN.....	40
BAB IV PENUTUP	43
A. SIMPULAN.....	41
B. HAMBATAN DAN HARAPAN.....	42
LAMPIRAN	4



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), salah satu hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Indikator peningkatan kinerja instansi pemerintah dapat ditilik melalui ukuran pengelolaan keuangan yang sehat dan modern, pengukuran kinerja dengan indikator capaian, dan keterkaitan kegiatan dengan program instansi.

Dinamika organisasi merupakan salah satu faktor yang tak terelakkan dalam perkembangan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik. Seiring perkembangan teknologi serta digitalisasi, penyelarasan peta proses bisnis Kementerian Keuangan, dan arah kebijakan kelembagaan secara nasional, Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terus melakukan reformasi birokrasi dan perbaikan kelembagaan. Penyelarasan organisasi pemerintah sesuai dengan peta proses bisnis tersebut dilakukan agar instansi DJKN mampu terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan berdasarkan kebutuhan pelayanan di masa depan.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menyelenggarakan fungsi antara lain:



- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Guna melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan sebelumnya, telah dilakukan penataan organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Adapun struktur organisasi KPKNL terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pehgadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.
- c. Seksi Piutang Negara;
mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi

dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

e. Seksi Kepatuhan Internal;

mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

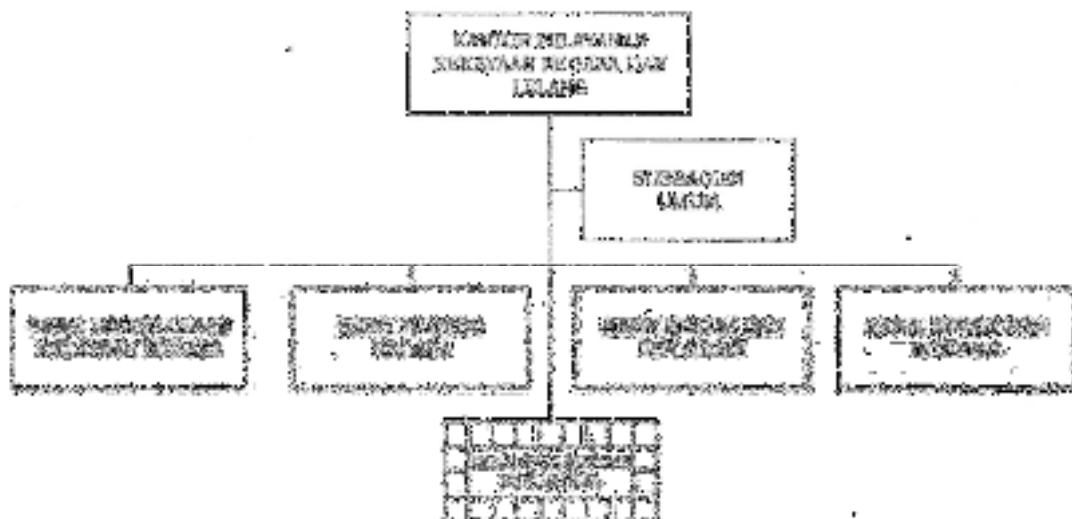
f. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari:

1) Jabatan Fungsional Penilai

Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/ atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Jabatan Fungsional Pelelang

Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,dan wewenang untuk melaksanakan lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela. Bagan struktur organisasi KPKNL dengan 1 (satu) subbagian, 4 (empat) seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional masing-masing di bawah Kepala Kantor dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi KPKNL

KPKNL Samarinda berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 6, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang,

KPKNL Samarinda dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan didukung oleh 1 (satu) subbagian, 4 (empat) seksi, beserta Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing bidang kerja yang ditetapkan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh KPKNL Samarinda dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan organisasinya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang yang dirinci sesuai jabatan dan kedudukan sebagai berikut

- i. Kepala Kantor : 1 (satu) orang
- ii. Subbagian Umum : 6 (enam) orang
- iii. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara : 5 (lima) orang
- iv. Seksi Piutang Negara : 3 (tiga) orang
- v. Seksi Hukum dan Informasi : 4 (empat) orang
- vi. Seksi Kepatuhan Internal : 3 (tiga) orang
- vii. Jabatan Fungsional Pelelang : 4 (empat) orang
- viii. Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah : 3 (tiga) orang



Gambar 2. Struktur Organisasi KPKNL Samarinda

C. PERAN STRATEGIS INSTANSI

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Samarinda memiliki peran strategis dalam melaksanakan implementasi kebijakan terkait bidang-bidang



tersebut. Tugas dan fungsi tersebut merupakan sarana organisasi dalam menjalankan tugas yang diemban demi mewujudkan tujuan organisasi, sesuai dengan kerangka visi dan langkah misi organisasi DJKN. Lebih lanjut, tugas dan fungsi KPKNL Samarinda dijabarkan dalam peran strategis sebagai berikut.

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai instansi vertikal DJKN yang berperan dalam pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Samarinda memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara. Upaya optimalisasi antara lain dilakukan dengan cara pengelolaan kekayaan negara dengan baik, persertipikatan tanah Barang Milik Negara, pemanfaatan barang milik negara untuk peningkatan pendapatan negara berupa penerimaan negara bukan pajak, pemanfaatan barang milik negara untuk mendukung efisiensi belanja dan pemanfaatan aset negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam kaitannya dengan fungsi DJKN sebagai *asset manager*, KPKNL Samarinda mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, serta penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan. KPKNL Samarinda berperan membantu satuan kerja instansi vertikal kementerian/lembaga untuk menciptakan penatausahaan barang milik negara (BMN) yang tertib hukum, tertib fisik dan tertib administrasi.

Untuk menuju optimalisasi tersebut KPKNL Samarinda berperan aktif dalam penertiban Barang Milik Negara (BMN) pada tiap satuan kerja (satker) dalam wilayah kerja dengan tujuan utama sebagai berikut:

- a. Melakukan pemutakhiran pembukuan BMN,
- b. Mewujudkan penatausahaan BMN di seluruh satuan kerja (satker) Pemerintah Pusat pada wilayah kerja KPKNL Samarinda,
- c. Melakukan tindak lanjut penatausahaan dan pengelolaan BMN yang tertib dan optimal.

Saat ini, peran KPKNL Samarinda menjadi semakin strategis dikarenakan sebagian wilayah kerja KPKNL Samarinda direncanakan akan menjadi calon Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPKNL Samarinda dalam pengelolaan kekayaan negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, KPKNL Samarinda terus berupaya meningkatkan kinerja yang baik khususnya dalam rangka optimalisasi pengelolaan kekayaan negara.

2. Pelayanan Penilaian



Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi. Penilaian dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan BMN lain yang berada di lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi di bidang penilaian. Hasil penilaian kekayaan negara tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, pemindahtanganan BMN, dan pengurusan piutang negara (penilaian barang jaminan). Dengan demikian, hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *The Highest and Best Use*.

3. Pengurusan Piutang Negara

KPKNL Samarinda mempunyai peran yang strategis dalam pengurusan piutang negara. Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah pusat/daerah dan badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab lain yang sah.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Pengurusan Piutang Negara semakin memperkuat peran dalam bidang pengurusan piutang negara melalui peran aktif dan sinergi antara DJKN dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan piutang negara.

KPKNL Samarinda juga berperan dalam pengelolaan piutang daerah melalui pengurusan berkas kasus piutang negara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di wilayah kerja KPKNL Samarinda yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Melalui peran tersebut, KPKNL Samarinda telah berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui pengurusan piutang daerah dan memperbaiki kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Pelayanan Lelang

Pelayanan Lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Secara istilah, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga



tertinggi yang didahului adanya Pengumuman Lelang. Selain itu, lelang merupakan bentuk pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan yang telah dilekatkan hak tanggungan dan eksekusi terhadap putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mengedepankan asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. KPKNL Samarinda dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat selalu mengutamakan pelaksanaan lelang yang transparan, akuntabel, kompetitif, dan efisien. Diharapkan dengan semakin berkembangnya teknologi, khususnya terkait pengembangan *e-auction* dan *platform marketplace auction*, lelang dapat menjadi sarana transaksi pilihan masyarakat serta dapat berperan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPKNL Samarinda berkontribusi dalam penerimaan negara yang berasal dari:

- 1) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat diperoleh melalui:
 - a. PNBP dari pengelolaan BMN yang berasal dari pemanfaatan sewa, pemindahtanganan BMN melalui penjualan secara lelang.
 - b. PNBP dari pelayanan lelang berupa bea lelang dan bea permohonan lelang, hasil lelang pemindahtanganan BMN melalui penjualan secara lelang BMN yang telah dihapuskan, dan lelang barang rampasan untuk negara.
 - c. PNBP dari pengurusan piutang negara/daerah berupa biaya administrasi piutang negara.
- 2) Penerimaan pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan atas pelaksanaan lelang tanah dan/atau bangunan.
- 3) Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) atas pelaksanaan lelang tanah dan/bangunan.
- 4) Penerimaan negara yang berasal dari pengurusan piutang negara berupa pokok piutang.

Isu Strategis

1. Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari *asset administration* (penatausahaan aset) menjadi *asset manager* (manajer aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari Pengelola Barang (Kementerian Keuangan c.q DJKN) untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.



2. Optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.
3. DJKN sebagai aktor penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, hal ini terlihat dari pos terbesar dalam neraca berasal dari aset dan investasi pemerintah.
4. DJKN memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, melalui perencanaan, pengawasan, dan pengendalian investasi pemerintah pada BUMN.
5. Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) yang berada di wilayah Kalimantan Timur memerlukan peran aktif dan kontribusi dari KPKNL Samarinda untuk menyukseskan program pemerintah melalui tugas dan fungsi DJKN serta aktif bersinergi dan berkolaborasi dengan instansi terkait.
6. KPKNL Samarinda selalu menjalin sinergi dengan Pemerintah Daerah di wilayah kerja, melalui asistensi pengelolaan barang milik daerah, penilaian, pengurusan piutang daerah dan pelaksanaan lelang.

D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh KPKNL Samarinda pada Tahun 2024 yaitu:

1. Kondisi ekonomi masih melemah sehingga daya beli masyarakat rendah sehingga menjadikan pelaksanaan lelang tidak ada penawaran (TAP).
2. Terdapat pemohon lelang dan calon peminat atau pembeli lelang yang belum memahami prosedur pelaksanaan lelang karena adanya kendala sistem peralihan dari portal.lelang.go.id ke lelang.go.id.
3. Terdapat objek lelang yang batal dilaksanakan lelang karena SKPT tidak terbit.
4. Implementasi SIMAN V2 pada seluruh Kementerian/Lembaga memerlukan waktu untuk penyesuaian.
5. Terdapat persetujuan pengelolaan BMN yang sampai batas akhir pembayaran belum ditindaklanjuti oleh Pemohon.
6. Sertifikasi KKKS terkendala dokumen yang tidak lengkap.
7. Mekanisme Sertifikasi BMN melalui jalur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak dapat dimonitor oleh KPKNL.
8. Adanya tanah yang masuk kawasan hutan yang menyebabkan hasil pengukuran berubah.
9. Objek Penilaian berada di lokasi yang sulit untuk dijangkau.
10. Ketersediaan Sumber Daya Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Muda yang terbatas karena Penilai yang dimutasi belum ada penggantinya.



11. Debitur tanpa jaminan yang mengakibatkan tahapan pengurusan piutang negara hanya sampai pada penyampaian Surat Paksa.
12. Kurangnya pemahaman pengguna layanan terhadap gratifikasi.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, isu strategis organisasi, serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang dihadapi organisasi.

2. Bab II. Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan perkembangan implementasi pengelolaan kinerja.

3. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi, dan realisasi anggaran.

4. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara. Salah satu kondisi yang menjadi pertimbangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 adalah pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia.

KPKNL Samarinda senantiasa berupaya memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada



masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN yaitu *“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”* Pengertian profesional dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Pengelola Kekayaan Negara diharapkan dapat memiliki karakter kontributif, instrumental, otoritatif, berkelanjutan, dan adaptif. Penjabaran lebih lanjut karakter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Kontributif** berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan negara dapat mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta andil dalam penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional;
- b. **Instrumental** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran penting dalam keuangan negara melalui peran konsultatif, implementatif, dan pengawasan efektif dalam manajemen aset dan investasi;
- c. **Otoritatif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara DJKN menjadi acuan yang paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang dapat diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset lain di level nasional dan internasional;
- d. **Berkelanjutan** diwujudkan melalui peningkatan tata kelola dan nilai tambah aset dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur APBN karena adanya kemandirian finansial dan risiko yang minimum; dan
- e. **Adaptif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara mampu mengambil peluang dan responsif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan



5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2020-2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; dan
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Dalam rangka mendukung tujuan sebagaimana tersebut di atas, sebagai salah satu instansi vertikal dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Samarinda memiliki peran strategis dalam rangka mencapai tujuan tersebut yang dituangkan dalam 10 (sepuluh) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial, tertuang dalam sasaran strategis sebagai berikut:
 - a) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.
 - b) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
 - c) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya, tertuang dalam sarsan strategis sebagai berikut:
 - a) Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal
 - b) Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien tercermin dalam sasaran strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.
4. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien, tertuang dalam sasaran strategis sebagai berikut:
 - a) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif
 - b) Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
 - c) Komunikasi Publik yang Efektif
 - d) Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah.



Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh DJKN. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi DJKN yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial

Kondisi yang ingin dicapai dalam Arah Kebijakan ini adalah menjadi

- a. pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal, serta
- b. pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.

Adapun Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal adalah sebagai berikut.

- a. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh Kementerian/Lembaga
- b. Optimalisasi pengelolaan piutang negara
- c. Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara melalui penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara (Omnibus Law)
- d. Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap menjaga akuntabilitas

Adapun Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya adalah melalui

- a. peningkatan kapasitas SDM, perbaikan bisnis proses dan perangkat analisis Investasi Pemerintah, dan
- b. *cross function* unit vertikal DJKN/Kementerian Keuangan (DJP/DJBC/DJPB) dan SMV Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan program kerja SMV.

2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah pengelolaan lelang yang optimal. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai pengelolaan lelang yang optimal adalah dengan

- a. pelaksanaan *e-Auction* yang mengakomodasi prinsip-prinsip *ecommerce* baik secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan *startup* di bidang *marketplace*, dan
- b. pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern.

3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan arah kebijakan ini adalah penilaian yang berkualitas. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut adalah



- a. pengembangan sistem informasi penilaian yang terintegrasi dengan instansi terkait secara nasional yang dapat digunakan dalam pengelolaan kekayaan negara, serta
- b. peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.

4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah:

- a. organisasi dan SDM yang optimal,
- b. sistem informasi yang andal dan terintegrasi,
- c. pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, serta
- d. komunikasi publik yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai organisasi dan SDM yang optimal adalah melalui:

- a. restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN;
- b. penguatan penyedia tenaga fungsional dan profesional bersertifikasi; dan
- c. pembentukan unit pengelola BMN Hulu Migas.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah

- a. transformasi digital manajemen aset dengan mewujudkan *IT-Based Service* Kekayaan Negara,
- b. pengembangan pusat data yang integratif dan andal untuk berbagai kepentingan, dan
- c. peningkatan kapabilitas tata kelola TIK DJKN.

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, DJKN melaksanakan program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, DJKN harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat Kantor Vertikal. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

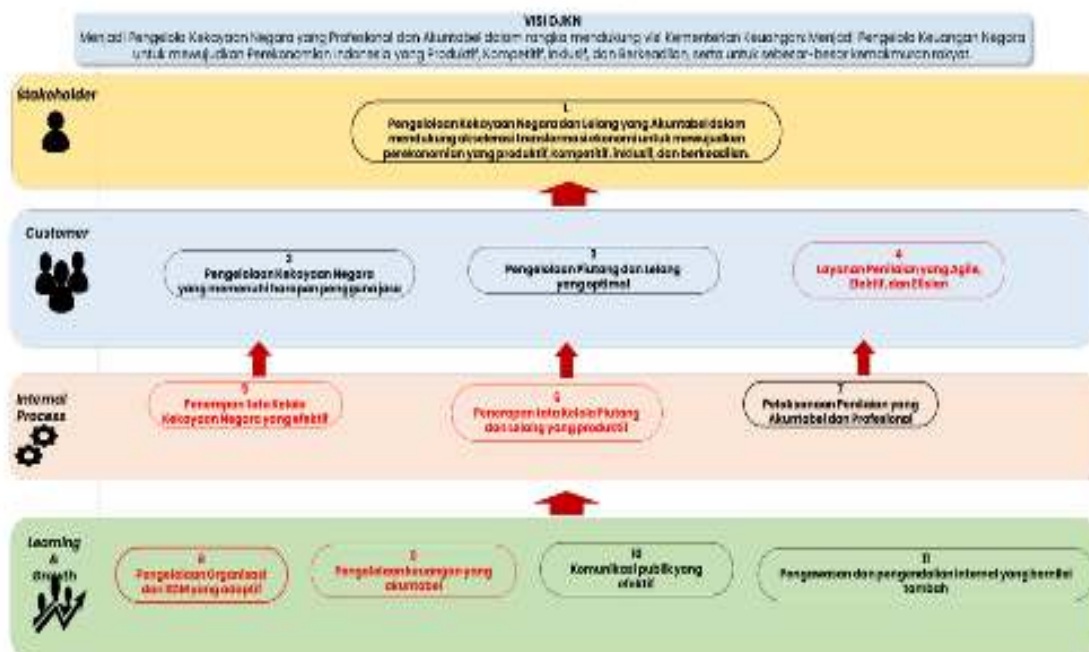
B. PERJANJIAN KINERJA

Dengan adanya penataan organisasi sebagai salah satu pilar dalam reformasi birokrasi, diharapkan bahwa pencapaian target penerimaan negara dan pelayanan kepada masyarakat akan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Untuk mendukung hal tersebut, setiap kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diinstruksikan untuk menetapkan indikator dan target kinerja yang menjelaskan keberhasilan pencapaian kinerja baik berupa hasil (*output*) maupun manfaat (*outcome*). Penetapan indikator dan target kinerja tersebut dikenal sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perencanaan kinerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan prima dengan tetap menjaga integritas dan mempersembahkan kinerja terbaik di lingkungan instansi tersebut berada. Dalam mengemban tugas dan fungsi, KPKNL Samarinda mempunyai **visi dan misi** yang sejalan dengan visi dan misi Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara yang merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN yaitu, **”Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”**

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, KPKNL Samarinda menuangkan perencanaan kinerja tahun 2024 dalam sebuah Perjanjian Kinerja KPKNL Samarinda Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dan Kepala KPKNL Samarinda sebagai berikut

PETA STRATEGI



Gambar 3. Peta Strategi KPKNL Samarinda Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang yang Akuntabel Dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi Untuk Mewujudkan Perekonomian Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Indeks Integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%
		2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
		3c-N	Persentase Penyelesaian Crash Program Keringanan Utang	100%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	29%
		6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	89%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
		8b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		9b-CP	Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%
10	Komunikasi Publik yang Efektif	10a-CP	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82
		11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZIWBK/WBBM	100%

Program/Kegiatan	Anggaran*
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp425.912.000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp27.411.000
2. Pengelolaan Aset	Rp398,501,000
Dukungan Manajemen	Rp2,359,514,000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp17,163,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp2,309,224,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp15,447,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp17,680,000

*) Pagu Revisi per 31 Desember 2024

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA*

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
1b-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30%	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10%	45%	45%	60%	60%	86,5%	86,5%
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal							
3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3c-N	Persentase Penyelesaian Crash Program Keringanan Utang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%



6 Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif								
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	81%	81%	29%	29%
6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
7 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional								
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
8 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal								
8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	60%	60%	75%	75%	90%	90%
9 Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel								
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	60	60
9b-CP	Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
10 Komunikasi Publik yang Efektif								
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11 Pengawasan Dan Pengendalian Internal Yang Bernilai Tambah								
11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZIWBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100%

*) Rincian Target Capaian Kinerja Tahun 2024 setelah adendum



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

No.	SS/IKU	Inisiatif Strate-gis	Output / Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penang-gung Jawab	Biaya
				Kegiatan	Output			
1	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Perluasan basis Lelang Sukarela melalui ekstensifikasi objek lelang hak menikmati dan permohonan lelang dari pelaku usaha	1. Jumlah pelaksanaan lelang hak menikmati 2. Jumlah pelaksanaan dan hasil lelang sukarela dari pelaku usaha	Q1: Pemetaan potensi, audiensi/ sosialisasi dan asistensi	Q1: Daftar Potensi Lelang	Q1 s.d. Q4	Jabatan Fungsional Pelelang	-
				Q2: Pemetaan potensi, audiensi/ sosialisasi dan asistensi	Q2: Daftar Potensi Lelang			
				Q3: Pelaksanaan lelang	Q3: Surat Penetapan Jadwal Lelang/tindak lanjut surat permohonan lelang hak menikmati : Minuta Risalah Lelang			
				Q3: Pelaksanaan lelang	Q3: Surat Penetapan Jadwal Lelang/tindak lanjut surat permohonan lelang hak			



					menikmati : Minuta Risalah Lelang			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

SASARAN KERJA PEGAWAI*

No.	Rencana Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang yang Akuntabel Dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi Untuk Mewujudkan Perekonomian Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		Indeks Integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%
		Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
		Persentase Penyelesaian Crash Program Keringanan Utang	100%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	29%
		Persentase Produktivitas Lelang	89%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%



No.	Rencana Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%
10	Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Indeks Efektivitas UKI	82
		Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZIWBK/WBBM	100%

*) Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2024 setelah adendum

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja DJKN Tahun 2024, DJKN berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut.

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pecapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis sebagai berikut.

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *minimize*

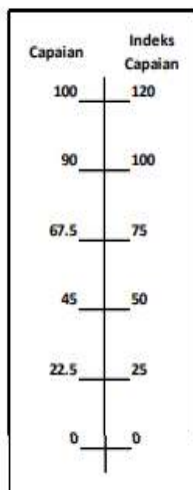
Indeks Capaian = $[1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *stabilize*

$$I_n = I_{n-1} + \frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} (C_n - C_{n-1})$$

Grafik :



I_n = Indeks capaian

I_{n-1} = Indeks capaian dibawahnya

I_{n+1} = Indeks capaian diatasnya

C_a = Capaian awal = $\text{Realisasi}/\text{Target} \times 100$

C_n = Capaian

- Apabila Realisasi > Target, maka

$$C_n = 100 - (C_a - 100)$$

note: C_a maksimum adalah 200

- Apabila Realisasi < Target maka $C_n = C_a$

C_{n-1} = Angka Capaian di bawah C_n

C_{n+1} = Angka Capaian di atas C_n

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Dalam subbab ini disajikan capaian kinerja KPKNL Samarinda untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPKNL Samarinda sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPKNL Samarinda. Secara keseluruhan sasaran strategis yang dijabarkan dalam 20 Indeks Kinerja Utama (IKU) tersebut menghasilkan 19 IKU dengan indeks capaian hijau (capaian diatas 100%) dan 1 IKU dengan indeks capaian berwarna kuning (80,32%) yaitu IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut.

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang yang Akuntabel Dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi Untuk Mewujudkan Perekonomian Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan							
	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	112,56	86,31	86,31	109,38	109,38	120,78	120,78	
Capaian	112,56	86,31	86,31	109,38	109,38	120,78	120,78	
Nilai Kinerja	112,56	86,31	86,31	109,38	109,38	120	120	

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang yang Akuntabel Dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi Untuk Mewujudkan Perekonomian Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan							
	1b-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	10	20	20	30	30	89,17	89,17	MAX/ TLK
Realisasi	10	20	20	42	42	92,44	92,44	
Capaian	100	100	100	140	140	103,67	103,67	
Nilai Kinerja	100	100	100	120	120	103,67	103,67	



K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Kebutuhan							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	N/A	50	50	60	60	71,50	71,50	MAX/ TLK
Realisasi	N/A	95,75	95,75	81,72	81,72	77,94	77,94	
Capaian	N/A	191,51	191,51	136,20	136,20	109,01	109,01	
Nilai Kinerja	N/A	120	120	120	120	109,01	109,01	

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	N/A	45	45	60	60	86,50	86,50	MAX/ TLK
Realisasi	N/A	75,64	75,64	92,31	92,31	96,10	96,10	
Capaian	N/A	168,08	168,08	153,85	153,85	111,10	111,10	
Nilai Kinerja	N/A	120	120	120	120	111,10	111,10	

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	82,85	58,73	58,73	66,48	66,48	80,32	80,32	
Capaian	82,85	58,73	58,73	66,48	66,48	80,32	80,32	
Nilai Kinerja	82,85	58,73	58,73	66,48	66,48	80,32	80,32	

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	116,25	100,58	100,58	102,41	102,41	103,61	103,61	
Capaian	116,25	100,58	100,58	102,41	102,41	103,61	103,61	
Nilai Kinerja	116,25	100,58	100,58	102,41	102,41	103,61	103,61	



K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	3c-N	Persentase Penyelesaian Crash Program Piutang Negara						
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	N/A	30	30	60	60	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	N/A	66,67	66,67	750	750	900	900	
Capaian	N/A	222,23	222,23	1.250	1.250	900	900	
Nilai Kinerja	N/A	120	120	120	120	120	120	

K-Wide	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian						
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	MAX/ TLK
Realisasi	120	117,44	117,44	118,24	118,24	117,35	117,35	
Capaian	160	156,58	156,58	157,65	157,65	156,47	156,47	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan						
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	N/A	40	40	60	60	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	N/A	51,28	51,28	96,15	96,15	173,72	173,72	
Capaian	N/A	128,20	128,20	160,25	160,25	173,72	173,72	
Nilai Kinerja	N/A	120	120	120	120	120	120	

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)						
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	10	32	32	80	80	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	12	36	36	84,17	84,17	122,78	122,78	
Capaian	120	112,50	112,50	105,21	105,21	122,78	122,78	
Nilai Kinerja	120	112,50	112,50	105,21	105,21	120	120	



K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	96	90	90	81	81	29	29	MIN/ TLK
Realisasi	15,15	85,84	85,84	64,60	64,60	18,14	18,14	
Capaian	184,22	104,62	104,62	120,24	120,24	137,44	137,44	
Nilai Kinerja	120	104,62	104,62	120	120	120	120	

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif							
	6b-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	30	45	45	60	60	89	89	MAX/ TLK
Realisasi	56,17	73,55	73,55	106,10	106,10	105,38	105,38	
Capaian	187,23	163,44	163,44	176,83	176,83	118,40	118,40	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	118,40	118,40	

K-Wide	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	7a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	16	16	16	16	16	16	16	MIN/ TLK
Realisasi	0	0,44	0,44	0,58	0,58	0,43	0,43	
Capaian	200	197,25	197,25	196,37	196,37	197,31	197,31	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

K-Wide	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	45	60	60	75	75	90	90	MAX/ TLK
Realisasi	74,29	100,52	100,52	108	108	115	115	
Capaian	165,09	167,53	167,53	144	144	127,78	127,78	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	



K-Wide	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	N/A	N/A	N/A	85	85	85	85	MAX/ TLK
Realisasi	N/A	N/A	N/A	99,42	99,42	98,58	98,58	
Capaian	N/A	N/A	N/A	116,96	116,96	115,98	115,98	
Nilai Kerja	N/A	N/A	N/A	116,96	116,96	115,98	115,98	

K-Wide	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	9a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	N/A	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	N/A	104,41	104,41	105,21	105,21	120	120	
Capaian	N/A	104,41	104,41	105,21	105,21	120	120	
Nilai Kinerja	N/A	104,41	104,41	105,21	105,21	120	120	

K-Wide	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	9b-CP Persentase Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	10	10	10	10	10	10	10	MIN/ TLK
Realisasi	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	
Capaian	200	200	200	200	200	200	200	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

K-Wide	Komunikasi Publik yang Efektif							
	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX/ AVG
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	
Capaian	125	125	125	125	125	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	



K-Wide	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
	11a-N Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	5	15	15	20	20	82	82	MAX/ TLK
Realisasi	5	15	15	20	20	93,53	93,53	
Capaian	100	100	100	100	100	114,06	114,06	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	114,06	114,06	

K-Wide	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
	11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d Q3	Q4	2024	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	120	120	
Capaian	100	100	100	100	100	120	120	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	120	120	

Dalam Pengukuran kinerja tahun 2024 KPKNL Samarinda mempunyai 11 (sebelas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) IKU yang secara keseluruhan mempunyai persentase hasil yang cukup baik secara perspektif dan bobot.

2. Kinerja KPKNL Samarinda Tahun 2019-2024

Kinerja KPKNL Samarinda sejak tahun 2019-2024 secara garis besar dapat dikatakan cukup memuaskan meski ada beberapa target yang belum dapat tercapai khususnya pada tahun 2021, satu target pada tahun 2023, dan satu target pada tahun 2024. Meskipun demikian, seiring dengan mulai pulihnya perekonomian nasional, capaian kinerja KPKNL Samarinda pun tetap terjaga dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di atas 100 persen. Kinerja tersebut dapat dibagi dalam beberapa bidang sebagai berikut.

a. Pengelolaan Kekayaan Negara

Program pengelolaan kekayaan negara merupakan suatu peran yang sangat strategis bagi DJKN pada umumnya dan KPKNL Samarinda pada khususnya. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJKN tahun 2020-2024, telah ditetapkan 4 tujuan dan 4 sasaran strategis. Peran DJKN dalam sasaran tersebut diwujudkan dengan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial.



KPKNL Samarinda juga berusaha melakukan pengelolaan negara yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *the highest and best use*. Kinerja di bidang pengelolaan kekayaan negara dapat digambarkan sebagai berikut.

Program sertifikasi tanah pemerintah tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut.

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2020	51	51	100,00%
2	2021	82	82	100,00%
3	2022	163	172	105,52%
4	2023	337	390	115,73%
5	2024	156	271	173,72%

Tabel 1. Kinerja Sertifikasi BMN Tahun 2019 – 2024

Dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, khususnya terkait pemanfaatan barang milik negara, terdapat kegiatan pendukung berupa penilaian BMN yang dikoordinasikan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Dalam kurun waktu 2020-2024 penilaian yang dilakukan adalah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN). Selain itu juga ada penilaian terhadap barang rampasan Bea Cukai dan Barang Milik Daerah (BMD). Hasil dari pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah adalah berupa laporan Penilaian yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN maupun BMD.

b. Penerimaan dan Pengamanan Penerimaan Negara

Di bidang penerimaan dan pengamanan penerimaan negara ini mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor piutang negara dan juga penerimaan di sektor lelang. Ditilik dari data capaian kinerja sepanjang kurun waktu 5 tahun terakhir, dapat dikatakan kinerja KPKNL Samarinda pada tahun 2020-2024 cukup baik dan masih ada potensi yang dapat digali serta ditingkatkan lagi pada periode berikutnya. Adapun di sektor lelang, kinerja KPKNL Samarinda dalam kurun waktu 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut.

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2020	136.800.000.000	137.279.334.372	100,35 %
2	2021	150.000.000.000	273.087.943.996	182,06 %
3	2022	164.000.000.000	254.733.364.278	155,33 %
4	2023	257.500.000.000	221.685.663.360	86,09 %
5	2024	287.000.000.000	230.373.439.457	86,09 %

Tabel 2. Kinerja Capaian Pokok Lelang Tahun 2020-2024



Sedangkan di sektor piutang negara, kinerja KPKNL Samarinda tergambar dalam tabel berikut.

Tahun	BIAD			BKPN SELESAI		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2020	15.988.134	46.389.073	290,15	79	145	183,54
2021	30.000.000	40.549.549	135,16	180	505	280,56
2022	35.000.000	74.671.022	213,35	400	557	139,25
2023	30.000.000	65.225.229	217,42	504	517	102,58
2024	35.000.000	67.368.615	900%	66	41	18,14%

Tabel 3. Kinerja Piutang Negara 2020-2024

3. Upaya dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi organisasi dan pencapaian target kinerja, KPKNL Samarinda telah melakukan beberapa upaya selama tahun 2024 yang sejalan dengan visi DJKN menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya atau tindakan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut.

- a. Peningkatan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi Untuk Mewujudkan Perkenomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan.
 - 1) Di bidang pengelolaan kekayaan negara telah dilakukan penyampaian permintaan data barang rampasan dari satker kejaksan setiap bulan serta identifikasi dan verifikasi BMN rusak berat di satker melalui Aplikasi SIMAN yang saat ini telah berubah menjadi SIMAN V2.
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan satker yang telah menerima persetujuan sewa supaya segera melakukan perjanjian sewa dengan calon penyewa. Melakukan koordinasi dengan satker terkait persetujuan penjualan yang sudah diajukan lelang namun belum laku.
 - 3) Di bidang Lelang telah dilakukan penggalan potensi lelang kepada beberapa *stakeholder* dengan frekuensi permohonan lelang hak tanggungan terbanyak, penggalan potensi lelang kepada beberapa perbankan dengan frekuensi pengajuan lelang rendah, dan akselerasi permohonan lelang BMN.



- 4) Di bidang Piutang Negara telah dilakukan pemanggilan kepada debitur dan melakukan penagihan baik secara daring maupun secara langsung (ke lapangan) serta melakukan penagihan secara intensif kepada debitur dengan nilai di atas 1 Miliar Rupiah.
- b. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
- 1) Di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara telah dilakukan koordinasi dalam rangka pencapaian target pengukuran SBSK dan optimalisasi SBSK dengan satuan kerja yang menjadi sasarannya.
 - 2) Terkait Indeks Integritas, pada KPKNL Samarinda tidak ditemui adanya pelanggaran integritas. Penilaian Integritas ini adalah secara nasional, sehingga apabila ada temuan di unit kerja lain akan berdampak pada nilai secara nasional. Dalam rangka meningkatkan integritas KPKNL Samarinda telah melakukan sosialisasi Antikorupsi dan gratifikasi baik kepada internal pegawai maupun kepada para pengguna layanan yang dilakukan oleh Kepala KPKNL. Selain itu KPKNL Samarinda secara periodik juga melakukan Survei Kepuasan Pengguna Layanan.
- c. Pengelolaan Piutang dan Lelang Yang Optimal
- 1) Di bidang Lelang telah dilakukan percepatan verifikasi permohonan lelang yang berpotensi laku.
 - 2) Di bidang Piutang Negara telah dilakukan upaya penyelesaian piutang negara melalui mekanisme crash Program keringanan utang dengan melakukan sosialisasi ke para debitur dan koordinasi dengan Penyerah Piutang. Koordinasi dengan Penyerah Piutang juga dilakukan terkait berkas yang sudah tidak bisa dilakukan pengurusan lagi dan akan ditetapkan sebagai Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), pemeriksaan Piutang Negara dan survei lapangan untuk pengurusan Piutang Negara yang optimal.
- d. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien
- 1) Melakukan koordinasi dengan pemohon internal dan eksternal terkait usulan penilaian.
 - 2) Memitigasi keluhan pemohon terkait layanan yang lambat dengan melakukan monitoring pelaksanaan penilaian.
 - 3) Melakukan pemetaan terkait objek penilaian, ketersediaan SDM dan sebaran lokasi penilaian.
- e. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif
- 1) Di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara telah dilakukan koordinasi dalam rangka pencapaian target sertifikasi BMN berupa tanah dengan kantor pertanahan dan satuan kerja yang menjadi target sertifikasi.



- 2) Terkait portofolio aset, KPKNL melakukan evaluasi kinerja Barang Milik Negara untuk selanjutnya hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam bentuk rekomendasi melalui pembinaan dan edukasi. Selanjutnya PB/KPB melakukan tindak lanjut dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*).
- f. Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif.
 - 1) Di bidang Piutang Negara telah dilakukan survei lapangan untuk pengurusan dan penagihan piutang negara yang optimal serta koordinasi dengan KPP, Dinas Kependudukan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait data debitur dalam rangka penerbitan PSBDT.
 - 2) Menetapkan jadwal lelang *e-Auction* dan *e-Conventional Auction*.
 - 3) Mengarahkan pemohon lelang untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan lelang secara online.
- g. Pelaksanaan Penilaian Yang Akuntabel dan Profesional
 1. Melaksanakan peer review konsep laporan penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.
 2. Melakukan koordinasi dengan Seksi PKN terkait nilai yang akan digunakan untuk menetapkan persetujuan.
 3. Melakukan koordinasi dengan pemohon khususnya untuk data usulan nilai dari satker.
- h. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif
 - 1) Di bidang pengelola kepegawaian telah dilaksanakan monitoring terhadap pengembangan kompetensi pegawai secara rutin dan *reminder* pegawai untuk melaporkan *progress* perkembangan kompetensi secara berkala.
 - 2) Di bidang Kepatuhan Internal telah dilaksanakan Dialog Kinerja Organisasi, Rapat Manajemen Risiko, refinement kinerja dan risiko, serta penyampaian laporan hasil rapat DKO dan Manajemen Risiko
- i. Pengelolaan Keuangan Negara Yang Akuntabel
 - 1) Melaksanakan pengelolaan anggaran dan BMN secara akuntabel dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh pegawai dan menuangkannya dalam dokumen DIPA serta laporan pelaksanaan anggaran.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Sekretariat DJKN serta pihak-pihak penyedia dalam pelaksanaan pengadaan BMN.
 - 3) Melaksanakan koordinasi dengan penyerah piutang, operator aplikasi dan PIC di Seksi Piutang Negara.
 - 4) Melakukan rekonsiliasi mandiri dari dropbox lelang KPKNL dengan PIC GLP KPKNL.
- j. Komunikasi Publik Yang Efektif



- 1) Edukasi seluruh pegawai mengenai prosedur penyediaan informasi publik dalam kegiatan *sharing knowledge*.
 - 2) Menunjuk UIC untuk bimbingan teknis penyediaan informasi publik PPID yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat DJKN.
- k. Pengawasan dan Pengendalian Internal Yang Bernilai Tambah
- 1) Melaksanakan pemantauan dan pengendalian intern secara rutin.
 - 2) Melaporkan hasil pemantauan berupa LHPPU, Laporan Kode Etik dan Media Sosial kepada Pimpinan Unit.

4. Evaluasi dan Analisis Keberhasilan Kinerja

Dalam implementasi/penerapan konsep *balance scorecard* visi dan misi yang telah diformulasikan, selanjutnya diterjemahkan dalam sejumlah sasaran strategis. Adapun sasaran strategis didefinisikan sebagai pernyataan tentang yang ingin dicapai (*output* dan *outcome*) dan/atau apa yang ingin dilakukan atau apa yang seharusnya kita miliki (*input*).

Peta strategis merupakan suatu panel instrumen yang memetakan sasaran strategis KPKNL Samarinda. Untuk mencapai sasaran capaian kinerja tahun 2024, KPKNL Samarinda menggunakan 4 standar perspektif *balance scorecard* yaitu *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Process*, dan *Learning & Growth*.

a. *Stakeholder Perspective* (30%)

Terhadap Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi Untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan.

- a) Indikator Kinerja Utama Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada tahun 2024 tercapai sebesar 120,68% (dengan nilai kinerja 120) dari target awal sebesar 100% dengan nominal Rp26.532.121.393,00 . Nilai manfaat ekonomi PNBPN dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang meliputi:
 - i. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pengelolaan BMN;
 - ii. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Piutang Negara; dan
 - iii. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Lelang.
- b) Indikator Kinerja Utama Indeks Integritas tercapai sebesar 92,44 % atau sebesar 103,67 % (nilai kinerja 103,67) dari target yang ditetapkan sebesar 89,17%.

b. *Customer Perspective* (20%)

Mengukur standar penilaian kinerja terkait dengan *financial sustainability* dan yang berorientasi pada keinginan pengguna layanan. Aspek-aspek terkait hal ini antara lain sebagai berikut.

- 1) Terhadap Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa



- a. Indikator Kinerja Utama Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Kebutuhan terealisasi sebesar 92,44% atau capaian sebesar 109,01% (nilai kinerja 109,01) dari target sebesar 89,17%.
 - b. Indikator Kinerja Utama Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN sebesar 111,19% (nilai kinerja 111,19) atau realisasi 96,10% dari target sebesar 86,50%.
- 2) Pengelolaan Piutang dan Lelang Yang Optimal.
- a) Indikator Kinerja Utama Persentase Realisasi Pokok Lelang terealisasi sebesar 80,27% (nilai kinerja 80,27) sehingga belum mencapai target yang ditetapkan. KPKNL Samarinda dapat merealisasikan Rp230.373.439.457,00 dari target Rp287.000.000.000,00.
Pencapaian tersebut masih perlu ditingkatkan lagi pada periode selanjutnya. Mengetahui bahwa tahun ini pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut masing-masing dari Pokok Lelang Kelas I dan Pokok Lelang Pegadaian belum berhasil mencapai target. Hal ini menjadi catatan tersendiri untuk KPKNL Samarinda untuk dapat memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat lebih tertarik untuk menjadikan lelang sebagai salah satu pilihan dalam bertransaksi jual beli serta melakukan percepatan proses lelang mulai dari verifikasi berkas permohonan hingga administrasi dokumen pasca lelang.
Meningkat sebagian wilayah di Kalimantan Timur akan dijadikan sebagai Ibu Kota Negara Indonesia, terdapat potensi akan meningkatnya minat beli masyarakat terhadap lelang di wilayah kerja KPKNL Samarinda.
 - b) Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara terealisasi sebesar Rp1.506.189.391,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.433.783.000,00 dengan capaian 105,05% (nilai kinerja 105,5).
 - c) Indikator Kinerja Utama Persentase Crash Program Keringanan Utang terealisasi sebanyak 26 debitur dari target 3 debitur dengan capaian 900% (nilai kinerja 120).
- 3) Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien.
- Indikator Kinerja Utama Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Penilaian dengan realisasi sebesar 117,35 dari target sebesar 75 atau capaian sebesar 156% (nilai kinerja 120).

c. *Internal Process Perspective* (25%)

Mengukur suatu proses dalam memberikan layanan kepada *Stakeholder* dan *Customer*.

- 1) Terhadap Sasaran Strategi Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif



- a) Indikator Kinerja Utama Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan mencapai hasil sebesar 173,72% (nilai kinerja 120) dari target sebanyak 156 dengan capaian realisasi 271.
- b) Indikator Kinerja Utama Persentase Evaluasi Kinerja BMN mencapai hasil sebesar 122,78% (nilai kinerja 120) dari target sebanyak 92 dengan capaian realisasi 109.
- 2) Terhadap Sasaran Strategi Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif
 - a) Indikator Kinerja Utama Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara mencapai hasil sebanyak 41 BKPN dengan target 66 BKPN atau tercapai sebesar 137% (nilai kinerja 120).
 - b) Indikator Kinerja Utama Persentase Produktivitas Lelang mencapai hasil 105,38% dengan target 89% sehingga indeks capaian sebesar 118,40% (nilai kinerja 118,40).
- 3) Terhadap Sasaran Strategi Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional Indikator Kinerja Utama Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian mencapai hasil 0,43% dengan target sebesar 16% sehingga indeks capaian sebesar 120% (nilai kinerja 120).

d. *Learning & Growth Perspective* (25%)

Menggambarkan kemampuan SDM dalam unit organisasinya untuk melakukan perbaikan dan perubahan.

- 1) Terhadap Sasaran Strategi Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif
 - a) Indikator Kinerja Utama Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (30 JP) mendapatkan nilai capaian yang memuaskan dari target yang ditetapkan sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 120% (nilai kinerja 120).
 - b) Indikator Kinerja Utama Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko tercapai sebesar 98,57 atau sebesar 123,22% (nilai kinerja 120) dari target yang ditetapkan sebesar 80.
- 2) Terhadap Sasaran Strategi Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
 - a) Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran dari target 100 dapat terealisasi sebesar 107,76% (nilai kinerja 107,76).
 - b) Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan dapat terealisasi secara maksimal sebesar 120% dari target 100% (nilai kinerja 120).
 - c) Indikator Kinerja Utama Deviasi PNPB Fungsional DJKN dengan polarisasi minimal dapat terealisasi sebesar 0,01% dari batas maksimum atau target sebesar 10% dengan indeks capaian 200% (nilai kinerja 120).
- 3) Terhadap Sasaran Strategi Komunikasi Publik Yang Efektif



Indikator Kinerja Utama Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik terealisasi sebesar 100 dari target sebesar 80 atau capaian sebesar 120% (nilai kinerja 120). Capaian diperoleh dari penyusunan laporan tahunan PPID dan penyediaan informasi publik pada website KPKNL Samarinda. Selama tahun 2024 tidak terdapat permintaan informasi publik meskipun telah disediakan form permohonan baik di Area Pelayanan Terpadu maupun di website KPKNL Samarinda.

- 4) Terhadap Sasaran Strategi Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif
 - a. Indikator Kinerja Utama Indeks Unit Kepatuhan Internal tercapai sebesar 93,53 atau sebesar 114,06% (nilai kinerja 114,06) dari target yang ditetapkan sebesar 82.
 - b. Indeks Kinerja Utama Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBBM terealisasi sebesar 120% dari target sebesar 100% (nilai kinerja 120).

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berpedoman pada Instruksi Menteri Keuangan Nomor 346/IMK.01/2017 tentang Gerakan Efisiensi Sebagai Bagian Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan dan Instruksi Menteri Keuangan Nomor 595/IMK.01/2019 tentang Pelaksanaan Efisiensi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, dan Honorarium Jasa Profesi di Lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Samarinda secara konsisten menerapkan gerakan efisiensi terkait pelaksanaan tugas maupun anggaran birokrasi.

Seksi Kepatuhan Internal sebagai Unit Kepatuhan Internal (UKI) KPKNL Samarinda secara periodik melakukan reviu atas gerakan efisiensi yang terlaksana dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-1/MK.9/2019 tentang Pedoman *Review* Pelaksanaan Gerakan Efisiensi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Terdapat 8 (delapan) aspek efisiensi di Kementerian Keuangan, yaitu pelaksanaan lembur, percepatan layanan, pengelolaan rapat, perjalanan dinas, jamuan rapat, honorarium narasumber/tim kerja, penggunaan daya dan jasa, dan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi anggaran pada Aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran, pada tahun 2024 KPKNL Samarinda mencapai efisiensi anggaran dengan nilai 100. Hasil tersebut diperoleh melalui keberhasilan KPKNL Samarinda dalam mengelola sumber daya berupa anggaran yang optimal, efektif, dan efisien dalam melaksanakan dan mencapai target-target *output* yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024.

6. Program/Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja



Pada Tahun 2024 KPKNL Samarinda berhasil mempertahankan predikat sebagai kantor dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Hal tersebut membuktikan bahwa KPKNL Samarinda telah berhasil menunjukkan sebagai unit kerja berhasil mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan mampu memberikan pelayanan yang prima. Pada Tahun 2024, KPKNL Samarinda juga berhasil memperoleh penghargaan Nagara Dana Abyakta di bidang Pelayanan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 382 Tahun 2024 tanggal 7 Oktober 2024 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pejabat/Pegawai dan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Pejabat/Pihak Lainnya diluar Kementerian Keuangan. Perhargaan ini diberikan karena KPKNL Samarinda telah berhasil menyediakan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan, Pada Tahun sebelumnya, KPKNL Samarinda berhasil prestasi tingkat nasional, di antaranya adalah Juara Kedua Penghargaan Pengelolaan Arsip Unit Vertikal DJKN Tahun 2023, dan Peringkat ketiga Implementasi *Learning Organization* DJKN. Berbagai kegiatan dan inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Samarinda yang telah dilaksanakan sejalan dengan pencapaian kinerja tahun 2024. Beberapa inovasi program/kegiatan penunjang capaian kinerja tahun 2024 yang telah berjalan di tahun-tahun sebelumnya maupun yang baru dikembangkan di tahun 2024 antara lain sebagai berikut.

a. SIPESUT

Sistem Informasi Pelayanan Satu Pintu merupakan Area Pelayanan Terpadu (APT) daring KPKNL Samarinda. Memberikan kemudahan kepada pengguna layanan untuk berkonsultasi secara *online* melalui pesan ataupun Aplikasi Zoom. Dilengkapi dengan fitur layanan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.

b. SIPUAN

SIPUAN (Sistem Informasi Pengelolaan Aduan) merupakan sarana *Whistleblowing System* yang dapat dimanfaatkan bagi pihak internal maupun eksternal yang memiliki informasi dan ingin melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi pelanggaran atas kode etik, disiplin dan penyimpangan layanan oleh pegawai yang terjadi di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda.

c. QRCODE

Kumpulan Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) layanan unggulan yang meliputi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.

d. KUL.ID

Aplikasi yang berisi peraturan terkait lelang dan kalkulator perhitungan bea lelang laku bagi penjual dan pembeli sesuai dengan jenis dan tarif yang berlaku.



e. LUNASWAL

Aplikasi pencatatan pembayaran utang serta saldo hutang sebagai pengingat dan memudahkan *stakeholder* dalam memonitor pembayaran pembayaran utang serta saldo hutang.

f. KONSUMEN PKN

Aplikasi *tracking* surat agar memudahkan *stakeholder* mengetahui perkembangan surat yang telah disampaikan kepada KPKNL Samarinda.

g. SLOPKN

Formulir survei lapangan kekayaan negara berbasis digital untuk tanah, bangunan, kendaraan, peralatan/ mesin, dan lainnya.

h. SIAP Arsip

Guna mendukung pengelolaan arsip yang profesional maka aplikasi Sistem Arsip (SIAP) KPKNL Samarinda diimplementasikan untuk mendukung penataan arsip. Pengelolaan arsip melalui Aplikasi SIAP Arsip memberikan beberapa keunggulan, di antaranya adalah aplikasi memiliki basis web dan *smartphone*, keamanan aplikasi terjamin, adanya fitur cari/search yang menyeluruh, penginputan data kode klasifikasi dan jenis berkas yang mudah, serta masa aktif dan masa inaktif arsip terinformasikan dengan mudah.

i. PESUT ETAM (Pelayanan Suara untuk Etam)

Dalam rangka membangun unit pelayanan publik ramah kelompok rentan, KPKNL Samarinda menghadirkan inovasi PESUT ETAM atau Pelayanan Suara untuk ETAM yang dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder* penyandang tunanetra. Inovasi ini juga dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar unit pelayanan publik ramah kelompok rentan seperti tombol bantuan/darurat, *guiding block*, jalur landai, parkir, ruang tunggu, dan toilet prioritas, *hearing aid*, kruk, kursi roda, dan sebagainya.

7. Pelaksanaan Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko

Dalam menjaga efektivitas kinerja dalam mencapai target kinerja, KPKNL Samarinda melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko setiap triwulan. Kegiatan ini salah satunya bertujuan untuk mengevaluasi hasil kinerja dan tindakan yang telah dilaksanakan atau direncanakan pada periode sebelumnya, menyusun rencana aksi, serta memetakan profil risiko KPKNL Samarinda.

Berikut merupakan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh KPKNL Samarinda sebagai upaya mencapai target selama tahun 2024.

a. Pengelolaan Kekayaan Negara

- 1) Melaksanakan penggalian potensi BMN rusak berat dan wasdal terkait BMN tidak dioptimalkan.



- 2) Rapat koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan satker target dan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara terkait percepatan sertifikasi BMN tahun 2024.
 - 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi evaluasi kinerja dari satker target portofolio aset.
 - 4) Melaksanakan evaluasi kegiatan sertifikasi dengan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.
 - 5) Mengajukan NUP pengganti agar tercapai perhitungan NUP dapat tercapai dan mencari target pengganti dengan lokasi yang berdekatan.
- b. Piutang Negara
- 1) Melakukan koordinasi dengan Pemda Kutai Kartanegara terkait BKPN yang belum PSBDT.
 - 2) Melakukan penggalian potensi piutang negara untuk meningkatkan PNPB.
 - 3) Membuat perencanaan secara triwulanan yang selanjutnya dijabarkan secara bulanan.
- c. Lelang
- 1) Melaksanakan lelang sukarela/UMKM.
 - 2) Melakukan penggalian potensi lelang hak tanggungan dari pihak perbankan dan lelang BMN ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Penilaian
- 1) Menyusun jadwal monitoring/agendaris Penilaian.
 - 2) Melakukan *peer review* atas setiap konsep laporan penilaian.
 - 3) Koordinasi dengan Kanwil DJKN Kaltimara terkait bantuan penilaian.
 - 4) Pendetailan terhadap setiap permohonan yang menyangkut objek dan sebaran lokasinya.

8. Rencana Aksi

Di samping mendukung dan memanfaatkan isu strategis pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur untuk menjaring minat masyarakat untuk mengikuti lelang terutama di bidang properti dan memaksimalkan pengelolaan aset di Kota Samarinda sebagai daerah penyangga Ibu Kota yang baru, pada tahun 2025 KPKNL Samarinda menyusun rencana aksi utama sebagai berikut.

- a. Melaksanakan evaluasi kegiatan sertifikasi dengan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi kinerja dari satker target portofolio aset.
- c. Melakukan penggalian potensi Piutang Negara untuk meningkatkan PNPB.
- d. Melakukan penagihan langsung dan peningkatan tahap pengurusan.



- e. Melakukan penggalian potensi lelang ke perbankan untuk meningkatkan PNBP.
- f. Melaksanakan lelang sukarela/UMKM.
- g. Membuat Daftar Rencana Kegiatan serta estimasi biaya yang dikeluarkan pada subbagian/seksi/jabatan fungsional setiap triwulan atau bulanan dalam rangka pelaksanaan anggaran yang sesuai target penyerapan anggaran.
- h. Melakukan clustering daftar aset aktif yang berstatus rusak berat agar kemudian ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan atau penghapusan.
- i. Koordinasi dengan Kanwil DJKN Kaltimara terkait bantuan penilaian.
- j. Pendetailan terhadap setiap permohonan yang menyangkut objek dan sebaran lokasinya.
- k. Melakukan konfirmasi besaran biad Piutang Negara dengan petugas yang menangani pengurusan piutang negara sebelum melakukan penyetoran.
- l. Melakukan publikasi terkait kegiatan KPKNL Samarinda untuk meningkatkan citra DJKN pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.
- m. Meningkatkan kegiatan sosialisasi antikorupsi dan gratifikasi kepada stakeholder.
- n. Meningkatkan pengetahuan SDM pengelola Manajemen Kinerja dan Risiko.
- o. Meningkatkan pengetahuan SDM pengelola UKI.
- p. Pelaksanaan monev akan dilakukan secara berkala.

B. REALISASI ANGGARAN

Dengan berakhirnya proses e-Rekon & LK KPKNL Samarinda, berdasarkan data sampai dengan 31 Desember 2024 terhitung realisasi belanja unit KPKNL Samarinda pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp2.700.949.806** atau **96,97%** dari total pagu revisi dalam DIPA KPKNL Samarinda sebesar **Rp2.785.426.000**.

Realisasi anggaran tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut.

Program/Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi
Jumlah Seluruhnya	Rp2.785.426.000	Rp2.700.949.806
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp425,912,000	Rp401,337,469
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp27,411,000	Rp22,838,900
2. Pengelolaan Aset	Rp398,501,000	Rp378,498,569
Dukungan Manajemen	Rp2,359,514,000	Rp2,299,612,337
1. Legislasi dan Litigasi	Rp17,163,000	Rp14,173,500
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp2,309,224,000	Rp2,255,663,337

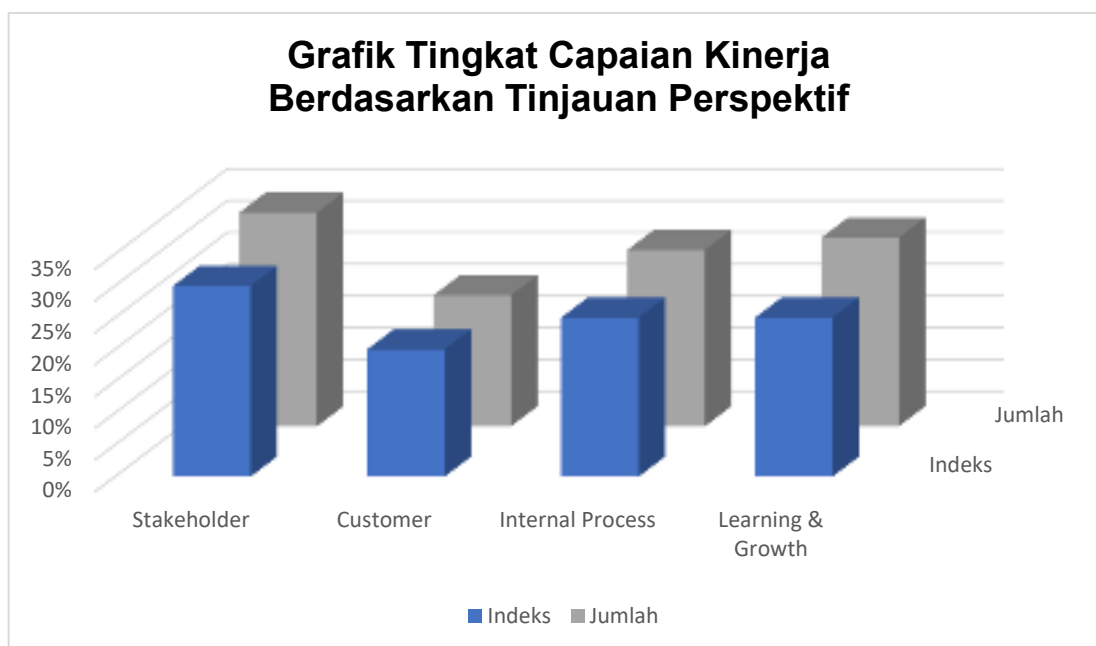


3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp15,447,000	Rp13,843,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp17,680,000	Rp15,932,500

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda tahun 2024 ditetapkan sesuai dengan Peta 1 Kemenkeu *Three DJKN* yang terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil evaluasi kinerja apabila dilihat dari tinjauan perspektif dapat dilihat pada grafik dan tabel dibawah ini.



Gambar 5. Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Tinjauan Perspektif

NO	PERSPEKTIF	INDEKS	JUMLAH
1	<i>Stakeholder Perspective</i>	30%	110,60%
2	<i>Customer Perspective</i>	20%	110,45%
3	<i>Internal Process Perspective</i>	25%	119,73%
4	<i>Learning & Growth Perspective</i>	25%	118,61%
JUMLAH CAPAIAN KINERJA		100%	114,85%

Tabel 4. Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Tinjauan Perspektif

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dilihat pada grafik dan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pencapaian sasaran tahun 2024 adalah **114,85%**. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja KPKNL Samarinda tahun 2024 secara



rata-rata telah melampaui indeks yang ditetapkan. Dengan tercapainya realisasi *stakeholder perspective* tercapai sebesar 110,60% dapat diartikan bahwa tujuan utama organisasi terutama dalam peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan, sejalan dengan capaian *customer perspective* tercapai sebesar 110,45% dalam pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa yang berpengaruh pada kepuasan pengguna layanan yang tinggi. Demikian pula dengan realisasi *internal process perspective* sebesar 119,73% dan *learning & growth perspective* sebesar 118,61%, menandakan bahwa proses investasi yang berupa peningkatan SDM, anggaran yang maksimal, serta pelaksanaan proses organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku telah mendukung keberhasilan tujuan organisasi.

B. HAMBATAN DAN HARAPAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta upaya mencapai target organisasi tahun 2024, KPKNL Samarinda menemui beberapa hambatan terutama dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, lelang, dan penilaian di antaranya sebagai berikut.

1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
 - a. Pengaplikasian SIMAN V2 pada seluruh Kementerian/Lembaga yang memerlukan waktu penyesuaian.
 - b. Keterlambatan satuan kerja dalam menyampaikan form perhitungan SBSK, dan terdapat beberapa NUP yang tidak dapat dilakukan perhitungan dan harus dilakukan penggantian.
 - c. Terdapat beberapa satuan kerja yang belum memahami aplikasi akun mitra dan sentuh tanahku.
 - d. Adanya tanah yang masuk kawasan hutan yang menyebabkan hasil pengukuran berubah.
 - e. Terdapat dua jalur mekanisme sertifikasi BMN yaitu PTSL dan jalur BMN sedangkan KPKNL tidak dapat memonitoring jalur PTSL.
2. Pelayanan Lelang
 - a. Sebagian besar permohonan lelang merupakan lelang eksekusi hak tanggungan dengan dominasi hasil lelang TAP.
 - b. Sumbangsih PNPB dari Pegadaian belum maksimal karena kendali di luar KPKNL.
 - c. Frekuensi lelang sukarela rendah.
3. Pelayanan Penilaian
 - a. Terdapat data usulan persetujuan dari satker (di aplikasi SIMAN) yang tidak disampaikan oleh seksi PKN (pada Nota Dinas), sehingga Tim Penilai tidak terinfo.
 - b. Objek penilaian berada di lokasi yang sulit untuk dijangkau.



- c. Ketersediaan SDM Penilai yang terbatas (ada yang mutasi keluar dan belum diberikan penggantinya).
- d. Masuknya permohonan baru berupa objek sewa (objek sewa memiliki SOP penyelesaian laporan penilaian paling pendek) pada saat jadwal penilaian sudah tersusun.

Dari beberapa hambatan dan kendala yang ditemui tersebut, KPKNL Samarinda berharap terus memperoleh dukungan untuk dapat melanjutkan mitigasi risiko yang telah dilaksanakan maupun rencana aksi yang akan dilakukan di kemudian hari dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi dalam upaya pencapaian target organisasi.

Langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan KPKNL Samarinda dalam meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah dengan melanjutkan sinergi dan koordinasi dengan DJKN Pusat, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, dan seluruh *stakeholder* baik instansi pemerintah pusat/daerah, perbankan, UMKM, dan masyarakat. Di samping itu, KPKNL Samarinda akan melanjutkan penggalan potensi PNBPN dari pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang melalui monitoring dan evaluasi langsung dengan kunjungan ke lapangan maupun tidak langsung melalui aplikasi pendukung dan persuratan dengan tindak lanjut penyampaian rekomendasi tindak lanjut melalui surat dinas maupun kunjungan ke lapangan untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini, kami berharap dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Samarinda, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja (LAKIN) tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi. Secara eksternal, Laporan Kinerja (LAKIN) harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholder*. Dengan demikian pada akhirnya DJKN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang profesional.



LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-2/WKN.13/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SAMARINDA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**



Peta Strategi

VISI DJKN

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Stakeholder



1.
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.

Customer



2.
Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa

3.
Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal

4.
Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Internal Process



5.
Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif

6.
Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif

7.
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Learning & Growth



8.
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

9.
Pengelolaan keuangan yang akuntabel

10.
Komunikasi publik yang efektif

11.
Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SAMARINDA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang yang Akuntabel Dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi Untuk Mewujudkan Perekonomian Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (21,985M)
		1b-CP	Indeks integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%
		2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (287M)
		3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100% (1,434M)
		3c-N	Persentase Penyelesaian Crash Program Keringanan Utang	100%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	29% (66BKPN)
		6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	89%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
		8b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		9b-CP	Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10%
10	Komunikasi Publik yang Efektif	10a-CP	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian	11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82

	internal yang bernilai tambah	11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%
--	-------------------------------	-------	--	------

Program / Kegiatan Tahun 2023

Anggaran

Program :

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Rp 434.652.000

Kegiatan :

- | | |
|---|----------------|
| 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp 27.920.000 |
| 2. Pengelolaan Aset | Rp 406.732.000 |

Program :

Dukungan Manajemen Rp 2.331.660.000

Kegiatan :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Legislasi dan Litigasi | Rp 17.671.000 |
| 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp 2.278.493.000 |
| 3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik | Rp 16.464.000 |
| 4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal | Rp 19.032.000 |

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan
Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
Jose Arif Lukito

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Samarinda



Ditandatangani Secara Elektronik
Bagus Kurniawan

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SAMARINDA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang yang Akuntabel Dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi Untuk Mewujudkan Perekonomian Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1b-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	45%	86,5%	86,5%
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal							
3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3c-N	Persentase Penyelesaian Crash Program Keringanan Utang	-	30%	30%	60%	60%	100%	100%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	81%	81%	29%	29%
6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							

7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	60%	60%	75%	75%	90%	90%
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
10	Komunikasi Publik yang Efektif							
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan Dan Pengendalian Internal Yang Bernilai Tambah							
11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100%

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Samarinda,



Ditandatangani Secara Elektronik
Bagus Kurniawan



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Perluasan basis Lelang Sukarela melalui ekstensifikasi objek lelang hak menikmati dan permohonan lelang dari pelaku usaha	1. Jumlah pelaksanaan lelang hak menikmati 2. Jumlah pelaksanaan dan hasil lelang sukarela dari pelaku usaha	Q1: Pemetaan potensi, audiensi/sosialisasi dan asistensi	Q1: Daftar Potensi Lelang	Q1 s.d. Q4	Jabatan Fungsional Pelelang	-
				Q2: Pemetaan potensi, audiensi/sosialisasi dan asistensi	Q2: Daftar Potensi Lelang			
				Q3: Pelaksanaan Lelang	Q3: Surat Penetapan Jadwal Lelang/tindak lanjut surat permohonan lelang hak menikmati : Minuta Risalah Lelang			
				Q4: Pelaksanaan Lelang	Q4: Surat Penetapan Jadwal Lelang/tindak lanjut surat permohonan lelang hak menikmati : Minuta Risalah Lelang			

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Samarinda



Ditandatangani Secara Elektronik
Bagus Kurniawan



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Bagus Kurniawan, S.S.T., Ak., M.A.	NAMA	Jose Arif Lukito	
NIP	198208212003121002	NIP	197109121996031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina, IV/a	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Samarinda	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Samarinda	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang yang Akuntabel Dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi Untuk Mewujudkan Perekonomian Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
		Indeks integritas	89,17	Penerima Layanan

2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	Penerima Layanan
		Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	Penerima Layanan
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Proses Bisnis
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian Crash Program Keringanan Utang	100%	Proses Bisnis
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Proses Bisnis
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipkatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	29%	Proses Bisnis
		Persentase Produktivitas Lelang	89%	Proses Bisnis
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	Proses Bisnis
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran

	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%	Penguatan Internal atau Anggaran
9.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Deviasi data PNBP Fungsional DJKN	10%	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Komunikasi Publik yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
11.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Efektivitas UKI	82	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	Penguatan Internal atau Anggaran

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>

PERILAKU KERJA		
	<p>secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>

PERILAKU KERJA

7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none">- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,



Pejabat Penilai Kinerja,





Ditandatangani secara elektronik
Bagus Kurniawan
198208212003121002



Ditandatangani secara elektronik
Jose Arif Lukito
197109121996031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	30 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q 3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%
2	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
3	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5 %	71,5 %
4	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	45%	86,5 %	86,5 %
5	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%
6	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%

7	Persentase Penyelesaian Crash Program Keringanan Utang	-	30%	30%	60%	60%	100%	100%
8	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
9	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
10	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
11	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	81%	81%	29%	29%
12	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
13	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
14	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
15	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	60%	60%	75%	75%	90%	90%
16	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
18	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
19	Indeks Efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82
20	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100%
KONSEKUENSI								
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							

2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
----	---

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Bagus Kurniawan
198208212003121002

30 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Jose Arif Lukito
197109121996031001



